

**DIPLOMASI PERTAHANAN INDONESIA  
DALAM MEWUJUDKAN POROS MARITIM DUNIA**

**INDONESIA'S DEFENSE DIPLOMACY  
TO MATERIALIZE THE GLOBAL MARITIME FULCRUM**

Aris Arif Mundayat<sup>1</sup>, Pujo Widodo<sup>2</sup>, Bayu Prakasa<sup>3</sup>

Prodi Diplomasi Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan

(bayu.prakasa@idu.ac.id)

**Abstrak** – Sebagai negara yang memiliki wilayah kelautan atau kemaritiman yang besar, Indonesia sudah sewajarnya mampu memaksimalkan pemanfaatan potensi tersebut demi kemajuan bersama. Pada faktanya, Indonesia belum mampu secara maksimal untuk memanfaatkan potensi tersebut, dengan sebab satu diantaranya yakni masih lemahnya sektor pertahanan dalam bidang maritim. Dalam prosesnya, muncul upaya memajukan Indonesia utamanya melalui sektor maritim dengan adanya penancangan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo. Dengan latar belakang tersebut, pada akhirnya penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia. Selanjutnya, dengan ruang lingkup periode tahun 2014-2017, penelitian ini berfokus kepada pembangunan sarana diplomasi pertahanan dan cara diplomasi pertahanan Indonesia yang dilakukan dengan merujuk pada bingkai teori yang relevan untuk digunakan. Penelitian ini disusun menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana yang dibangun demi mendukung diplomasi pertahanan adalah dengan kerjasama dengan negara-negara mitra dan pembangunan postur pertahanan negara. Cara yang digunakan dalam diplomasi pertahanan Indonesia adalah dengan meningkatkan peran aktif dalam forum atau organisasi mulai taraf regional hingga internasional. Dua aspek atau unsur tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia utamanya dalam pencapaian pilar nomor dua, yakni pertahanan, keamanan, penegakkan hukum, dan keselamatan laut.

**Kata Kunci : Diplomasi Pertahanan, Kebijakan Kelautan Indonesia, Poros Maritim Dunia**

**Abstract** – *Having such enormous and strategic nautical-territory, Indonesia ought to draw upon such potential for the national development. Nevertheless, Indonesia has not yet been able to exert the resources, as a consequence of the lack in maritime security and defense. Given to the circumstances, an effort to advance Indonesia primarily in the maritime sector had been taken place as in 2014 President Joko Widodo legitimately declare the national vision to become Global Maritime Fulcrum. Build upon the case, this research aims to analyze the efforts made by Indonesian government in*

---

<sup>1</sup> Aris Arif Mundayat, Ph.D, Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan.

<sup>2</sup> Kolonel Inf Dr. Pujo Widodo, S.E., M.A., M.D.S., M.Si (Han). Dosen Diplomasi Pertahanan di Universitas Pertahanan.

<sup>3</sup> Bayu Prakasa, S.Hum, M.Han. Iulusan Program Pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia, pada Program Studi Diplomasi Pertahanan.

*assisting the realization of Global Maritime Fulcrum through Defense Diplomacy. Furthermore, this writing attempts to disclose the development of defense diplomacy's instruments and how the government made use of those. In order to reveal this case, various aspects of Indonesia's defense diplomacy that had been occurred within 2014 – 2017 will be examined with the relevant theoretical frameworks. This research was arranged using descriptive analysis with qualitative approach. Supporting data is obtained through interviews, document, and literature study. The results shows that the defense diplomacy's instruments was built upon series of international cooperations and the development of state's defense posture itself. Therewith, Indonesian government undertake the defense diplomacy efforts by playing an active role in forums or organizations from regional to international levels. These two aspects eventually have a prime significance in shaping Indonesia as the Global Maritime Fulcrum, especially in the achievement of defense, security, law enforcement, and marine safety.*

**Keywords: Defense Diplomacy, Global Maritime Fulcrum, Indonesia's Maritime Policy**

## Pendahuluan

**S**ejak abad ke-9, Indonesia telah memiliki reputasi sebagai negara maritim. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan arkeologi berupa relief-relief candi, tulisan pada kitab kuno serta kapal bercadik. Lebih lanjut, dengan letak geografis Indonesia yang diapit oleh dua samudera, Hindia dan Pasifik, serta wilayah kepulauan yang besar, menempatkannya sebagai jalur lalu lintas laut dunia dan sebagai penghubung antara dunia Barat dan Timur<sup>4</sup>. Oleh karena itu, dalam pergaulan internasional pada masa-masa selanjutnya, Indonesia diakui secara resmi sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) terbesar di dunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Julukan tersebut sangat melekat dan

kemudian membentuk identitas serta jati diri Indonesia sebagai bangsa maritim.

Berbicara mengenai masyarakat maritim, maka tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kelautan. Laut, dalam konteks ini, dianggap sebagai kawasan dominan yang menyediakan sumber daya alam untuk kebutuhan makanan, sarana rekreasi, serta menjadi 'jalan raya' yang penting dalam aktivitas perdagangan dan komunikasi antar pulau<sup>5</sup>. Stigma yang sedari dulu dikembangkan oleh nenek moyang tersebut, semakin terkikis seiring dengan perkembangan zaman. Nyatanya, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah lebih banyak melakukan pembangunan di daratan dibandingkan sektor laut. Bahkan dalam kasus yang paling ekstrem, terjadi pula

---

<sup>4</sup> Hamengku Buwono X, "Budaya Maritim Indonesia: Peluang, Tantangan dan Strategi", diakses pada 30 Juli 2017, [http://maritim.wg.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2014/09/NgarsoDalem\\_MaritimRoadMapUGM.pdf](http://maritim.wg.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2014/09/NgarsoDalem_MaritimRoadMapUGM.pdf) dari

<sup>5</sup> J. D. Rais, *Menata Ruang Laut Terpadu* (PT. Pradnyaparamita, 2004) hlm. 69.

penyimpangan kesejarahan dalam literatur akademik yang menyebutkan bahwa penduduk Indonesia merupakan bangsa agraris.

Berangkat dari fakta tersebut, pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mencanangkan suatu visi dalam bidang kelautan bertajuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Gagasan utamanya adalah mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia di sektor kemaritiman, salah satunya pada pilar pertahanan, keamanan, penegakkan hukum, dan keselamatan laut.

Aspek pertahanan memainkan peran signifikan dalam pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Kepadatan jalur pelayaran di wilayah perairan Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan ancaman yang berpotensi menghambat laju pengembangan PMD. Adapun ancaman tersebut, diantaranya pelintasan kapal selam nuklir asing, penyelundupan senjata dan manusia, perusakan, serta pencurian kekayaan laut<sup>6</sup>.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberikan

mandat kepada Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan rencana aksi<sup>7</sup> berupa diplomasi pertahanan di bidang maritim. Salah satu capaiannya yaitu mengkomodasi kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional dimana dapat diwujudkan melalui kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat demi terciptanya stabilitas keamanan laut baik di tingkat regional maupun internasional.

Penciptaan lingkungan kondusif pada aktivitas kemaritiman pada akhirnya diharapkan mampu memperlancar proses pencapaian visi PMD.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pembangunan sarana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia dan Bagaimana cara diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan PMD?

### **Metode Penelitian**

Penelitian tentang diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia menggunakan metode

---

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2017), hlm. 11.

<sup>7</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia* (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2017), hlm. 13.

analisis secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penggunaan pendekatan kualitatif di dalam tesis ini ditujukan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti, yaitu diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan PMD dengan fokus terhadap sarana diplomasi pertahanan serta cara melakukan diplomasi pertahanan tersebut. Selanjutnya, fenomena ini dianalisis dan diinterpretasikan dengan maksud untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis situasi, fenomena, dan permasalahan yang terjadi di dalam proses kesepakatan kerjasama pertahanan sejak proses negosiasi, ratifikasi, hingga pelaksanaannya diuraikan dalam bentuk deskripsi dengan tetap fokus pada analisa pembangunan sarana diplomasi pertahanan dan cara yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan PMD melalui kerjasama pertahanan.

Adapun data yang dikumpulkan berkaitan dengan pembangunan sarana diplomasi pertahanan serta cara yang

dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan kerjasama tersebut. Dan teori yang digunakan sebagai pisau analisa adalah teori strategi dan konsep diplomasi pertahanan.

Berdasarkan gambaran atau prevalensi tersebut, kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini meliputi tiga cara, yakni melalui wawancara, studi dokumen dan studi pustaka.

Proses analisis data dilakukan melalui kegiatan kondensasi, penyajian data hingga penarikan kesimpulan sesuai dengan metode yang dikembangkan Miles dan Huberman<sup>8</sup>. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah perumusan rangkuman, pembuatan transkrip wawancara serta pemilihan data terkait pembangunan sarana dan cara diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mewujudkan visi Poros Maritim Dunia yang diperoleh dari pihak Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, serta TNI-AL. Pemilihan dan pengkategorisasian informasi melalui

---

<sup>8</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded*

*Sourcebook* (London: Sage Publications Inc, 1994) hlm. 54.

kategori berikut; 1) pembangunan sarana diplomasi pertahanan dalam bidang kemaritiman 2) cara diplomasi pertahanan dalam bidang kemaritiman.

Melalui teknik analisa data ini maka keterkaitan antara pembangunan sarana diplomasi pertahanan dengan cara diplomasi pertahanan dalam bidang kemaritiman dalam mewujudkan visi PMD dapat terungkap.

### **Analisis Data dan Pembahasan**

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti membagi pembahasan melalui sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain. Adapun subbab yang dimaksud terdiri dari teori dan konsep, serta pembahasan itu sendiri.

Sehingga, analisis data dan pembahasan akan dibagi menjadi lima bagian. Pertama, teori strategi. Kedua, konsep Diplomasi Pertahanan. Ketiga, pembangunan sarana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan PMD. Keempat, cara diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan PMD.

### **Teori Strategi**

Sejak zaman prasejarah hingga masa modern, kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan konflik atau peperangan demi memenuhi kepentingannya. Agar dapat memenangkan suatu peperangan atau konflik maka berkaitan dengan perumusan dan penggunaan strategi yang tepat.

Pada perkembangannya, saat ini konsep strategi didefinisikan lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kemampuan militeristik saja, namun juga mencakup semua bidang kehidupan manusia. Dalam konteks kenegaraan, strategi berkaitan erat dengan politik. Lebih lanjut, Joesoef<sup>9</sup> mengungkapkan korelasi dari kedua hal tersebut. Menurutnya, jika politik mengungkapkan tujuan dan menyatakan lawan, maka strategi memformulasikan sasarannya serta apa saja yang dibutuhkan demi mencapai *goals* tersebut. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwasanya strategi merupakan keseluruhan operasi intelektual dan fisik yang dipersiapkan untuk menanggapi dan mengendalikan setiap kegiatan kolektif di tengah-tengah konflik.

---

<sup>9</sup> D. Joesoef, *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2014), hlm. 5.

Selanjutnya, B.H. Liddell Hart<sup>10</sup>, menjelaskan bahwasanya dalam proses perancangan strategi, suatu negara harus mampu memperhitungkan sumber daya ekonomi dan *man-power* (manusia) sebagai salah satu kekuatan yang dapat mengakomodir kepentingan nasional. Kekuatan yang dihimpun didistribusikan ke dalam sebuah mekanisme penanganan terhadap hambatan-hambatan (finansial, tekanan diplomatik, kurangnya kemampuan *deterrence*) yang muncul saat proses pencapaian tujuan tersebut.

Pada kesempatan lain, Deibel<sup>11</sup> menjelaskan bahwasanya terdapat tiga komponen dalam proses penyusunan strategi. Adapun komponen tersebut, yakni tujuan (*ends*) yang didefinisikan sebagai kepentingan nasional, sarana (*means*) yang didefinisikan sebagai kapabilitas negara, dan cara (*ways*) yang nantinya akan direfleksikan melalui pelaksanaan strategi.

Adapun klasifikasi cara untuk mendayagunakan *means* berdasarkan kategori, diantaranya; **pertama**, sikap. Cara menggunakan sumber daya nasional dibagi atas tindakan pemaksaan menggunakan represi militer (*coersive*),

dan tindakan negosiatif dengan menggunakan kekuatan lunak (budaya, nilai politik serta kebijakan luar negeri) (*cooptive*). Konsep kooptif ini dikembangkan lebih dahulu oleh Joseph Nye<sup>12</sup> untuk menjelaskan kemampuan mengubah kehendak pihak lain dengan cara membujuk dan menarik perhatian.

**Kedua**, penyampaian kepentingan. Di dalam aspek ini, keterbukaan dalam menyampaikan serta mengakomodir kepentingan suatu negara akan diukur, apakah dilakukan secara terbuka (*overt*) dalam kegiatan pertemuan kenegaraan atau secara terselubung (*covert*) dengan sabotase, pembunuhan tokoh politik utama, atau kudeta untuk operasi paramiliter, melatih serta melengkapi kelompok bersenjata besar atau pemberontakan.

**Ketiga**, sasaran. Instrumen dapat dirancang sedemikian rupa agar dampaknya terasa oleh sasaran. Adapun ruang lingkup sasaran tersebut antara lain pemerintah negara lain, masyarakat atau bahkan aktor *non-state*<sup>13</sup>.

Teori strategi pada penelitian ini digunakan dalam mengungkapkan sarana dan cara pemerintah Indonesia untuk

<sup>10</sup> B. H. L. Hart, *Strategy* (Praeger, 1967), hlm. 336.

<sup>11</sup> T. L. Deibel, *Foreign Affairs Strategy: Logic for American Statecraft*, (London: Cambridge University Press, 2007), hlm. 293.

<sup>12</sup> J. Nye, *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power* (New York: Basic Books, 1990) hlm. 11.

<sup>13</sup> T. L. Deibel, loc. cit.

mencapai kepentingan nasionalnya, yakni mewujudkan visi PMD, melalui aktivitas diplomasi pertahanan.

### **Konsep Diplomasi Pertahanan**

Dalam perkembangan hubungan internasional di era modern, muncul konsep diplomasi pertahanan yang menggabungkan antara diplomasi dengan penggunaan cara-cara militer. Rodon Pedrason mendeskripsikan diplomasi pertahanan sebagai keseluruhan strategi yang dilakukan negara, yang mungkin sedang dalam kompetisi dengan negara lain, untuk membangun kepercayaan melalui praktik kerjasama ekonomi, budaya, politik, pertahanan serta diplomasi itu sendiri. Di dalam prosesnya, setiap negara membangun interaksi yang ditujukan untuk mengakomodir kepentingannya di berbagai macam bidang. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dalam membangun hubungan, termasuk di dalamnya sektor perdagangan, ekonomi dan pembangunan yang pada akhirnya mampu memperkuat keamanan serta mencegah

konflik dengan meningkatkan rasa saling percaya.<sup>14</sup>

Aktivitas diplomasi pertahanan dapat dilakukan pula melalui tiga model, yaitu diplomasi pertahanan untuk *confidence building measures*, diplomasi pertahanan untuk *capacity building*, dan diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan.

Pertama, *Defense diplomacy for confidence building measures* ditujukan untuk membangun hubungan baik dengan negara lain terutama dalam rangka menurunkan tensi atau menghindari mispersepsi antar pihak. Melalui keterbukaan tersebut, tingkat kepercayaan antar kedua negara akan meningkat sehingga dapat menekan potensi konflik.<sup>15</sup>

Terdapat tiga jenis tindakan dalam praktik diplomasi pertahanan untuk CBM, yaitu: 1) *Communication/declaration*, yakni pernyataan umum mengenai kepentingan, norma dan kepercayaan yang didukung oleh sekelompok negara sebagai dasar untuk menjalin hubungan antar negara. 2) *Constraints*, yakni kesepakatan bersama yang bersifat timbal balik mengenai pembatasan aktivitas

---

<sup>14</sup> Rodon Pedrason, "ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community?", *Disertasi untuk Universitas Ruprecht-Karls*, 2015, hlm. 13 – 15.

<sup>15</sup> A. Cottey, A. Forster, *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*, (Oxford: Oxford University Press, 2004), hlm. 19.

militer yang dilakukan secara signifikan oleh pihak tertentu karena jika dibiarkan akan meningkatkan potensi konflik. 3) *Transparency*, yakni pembukaan akses informasi mengenai postur, kemampuan dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya dengan maksud untuk mengurangi kecurigaan dan kesalahpahaman di antara negara yang bersangkutan. 4) *Verification*, yakni tindakan yang dirancang untuk mengkonfirmasi atau memverifikasi dari aspek kepatuhan negara terhadap perjanjian tertentu<sup>16</sup>.

Kedua, diplomasi pertahanan untuk *capability* dilakukan dalam rangka memperkuat kemampuan komponen pertahanan dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional.

Ketiga, diplomasi pertahanan untuk industri pertahanan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. Adapun kegiatan diplomasi pertahanan dalam cakupan ini, diantaranya:

a. Pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista);

- b. Penyeimbangan teknologi persenjataan, melalui kesepakatan transfer teknologi dalam kesepakatan pembelian alutsista;
- c. Kerjasama penanaman investasi dalam pembangunan industri pertahanan;
- d. Pelaksanaan program penelitian dan pengembangan bersama.<sup>17</sup>

### **Pembangunan Sarana Diplomasi Pertahanan dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia**

Dalam rangka mengungkap pembangunan sarana diplomasi pertahanan, data hasil penelitian pada kerjasama pertahanan maritim dengan negara-negara mitra akan dibahas menggunakan konsep diplomasi pertahanan Cottey dan Foster<sup>18</sup>. terutama mengenai model diplomasi pertahanan yang terdiri dari *Confidence Building Measure (CBM)*, *Capacity Building (CB)*, dan *Defence Industry (DI)*.

**Pertama**, apabila ditinjau dari CBM, pada prosesnya, pemerintah Indonesia terlebih dahulu melakukan kunjungan resmi kenegaraan dengan agenda sosialisasi program Poros Maritim Dunia. Langkah awal ini penting dilakukan agar

---

<sup>16</sup> A. Acharya, *The ASEAN Regional Forum: confidence building* (Canada: Dept. of Foreign Affairs and International Trade, Verification Research Program, 1997) hlm. 8 – 9

<sup>17</sup> Iis Gindarsah, “Indonesia’s Defence Diplomacy: Harnessing the Hedgy Strategy Against Regional Uncertainties”, (RSIS Working Paper, 2015) hlm. 4

<sup>18</sup> A. Cottey, A. Foster, op.cit, hlm. 35-39



negara sasaran memahami maksud dan tujuan dari pencanangan program tersebut serta membangun *confidence* antar-negara. Dalam beberapa pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, Australia, Denmark, Jepang, RRT dan Jerman, pemerintah Indonesia membuka forum dengan pemaparan isu-isu terkait dengan keamanan maritim yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional, regional dan internasional<sup>19</sup>.

Amitav Acharya mengemukakan bahwa terdapat jenis tindakan yang harus dilakukan dalam pembangunan *Confidence* dalam praktik diplomasi pertahanan untuk CBM<sup>20</sup>. Tindakan yang menjadi simbol terciptanya hubungan antar negara ditandai dengan adanya suatu upaya *communication/declaration*. Kegiatan ini diwujudkan melalui pernyataan umum mengenai kepentingan, norma, dan kepercayaan yang didukung oleh sekelompok negara sebagai dasar untuk menjalin hubungan antar negara.

Komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada 9 (sembilan) negara sasaran sedikit banyak telah mengakomodir kepentingan nasional dalam pelaksanaan PMD.

Pemahaman negara sasaran terhadap kepentingan tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meminimalisir peluang munculnya konflik akibat kesalahpahaman.

Setelah diadakannya upaya *communication/declaration*, Acharya menjelaskan bahwa hal yang penting dalam upaya pencapaian CBM antar negara adalah dengan adanya aspek keterbukaan (*transparency*)<sup>21</sup>. Dalam konteks diplomasi pertahanan, maka tindakan transparansi ini diwujudkan dalam pembukaan akses informasi mengenai postur, kemampuan dan kebijakan nasional negara-negara di bidang militer dan bidang terkait lainnya.

Dari sebanyak 9 (sembilan) negara yang secara resmi menyatakan dukungan terhadap pengembangan Poros Maritim Dunia, hanya 3 (tiga) negara saja, yakni: Amerika Serikat, Australia, dan Jerman yang sampai saat ini mampu mewujudkan sikap keterbukaannya melalui kesepakatan pertukaran data intelijen. Lebih lanjut, dapat dipahami bahwa pengembangan kerjasama *sharing* informasi intelijen sudah pasti melewati proses diplomatik yang panjang. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki

---

<sup>19</sup> M. Taufan, Wawancara pada 26 Oktober 2017

<sup>20</sup> Amitav Acharya, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Amitav Acharya, *loc. cit.*

kepentingan nasional untuk menjaga sumber daya –dalam hal ini berupa data intelijen– dari kemungkinan kebocoran rahasia negara yang dapat mengancam stabilitas keamanan.

Oleh karena itu, sangat wajar apabila dalam rentang waktu 4 tahun sejak dicanangkannya program PMD, pemerintah Indonesia baru sanggup meyakinkan 3 negara berbagi informasi intelijen. Meskipun pada praktiknya, pemerintah dituntut untuk mampu mempererat kerjasama *transparency* semacam ini dengan negara-negara lainnya.

Aspek terakhir yang penting dalam upaya pencapaian CBM adalah dengan adanya tindakan *verification*. Tindakan verifikasi di dalam konteks diplomasi pertahanan menurut Amitav Acharya, merupakan tindakan yang dirancang untuk mengkonfirmasi atau memeriksa ulang kepatuhan negara terhadap perjanjian tertentu<sup>22</sup>. Kegiatan ini ditujukan untuk mengevaluasi kerjasama yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, verifikasi juga diperlukan untuk meninjau ulang relevansi kesepakatan dengan dinamika lingkungan strategis negara-negara yang bersangkutan.

Kegiatan peninjauan ulang terhadap kerjasama pertahanan maritim antara Indonesia dengan kesembilan negara masih perlu ditingkatkan. Secara umum, terdapat 5 (empat) negara yang rutin menyelenggarakan evaluasi kerjasama pertahanan dengan Indonesia, yakni Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, dan RRT. Di lain pihak, Pemerintah juga melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kerjasama pertahanan dengan negara lain, misalnya dengan Korea Selatan. Selama 3 tahun terakhir, pemerintah melakukan kegiatan evaluasi terbatas yang membahas *progress* kerjasama pengadaan sejumlah 3 kapal selam<sup>23</sup>.

Berdasarkan pembahasan di atas, Indonesia melakukan 3 tindakan diplomatik demi pencapaian CBM, yang ditunjukkan melalui komunikasi/deklarasi (perjanjian dan/atau pernyataan resmi dukungan negara lain dalam pembangunan PMD), transparansi (kesepakatan pertukaran informasi intelijen di bidang keamanan maritim) dan verifikasi (evaluasi kegiatan kerjasama pertahanan sektor maritim).

Meskipun aktivitas tersebut belum mampu dipraktikan pada tiap negara

---

<sup>22</sup> Amitav Acharya, *loc. cit.*

<sup>23</sup> Sugeng Suryanto, Wawancara pada 25 Oktober 2017.

secara merata, namun minimal dengan adanya afirmasi kerjasama pertahanan dalam kerangka PMD, sudah cukup memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kerjasama pertahanan dengan kesembilan negara. Sehingga pada akhirnya *confidence* menjadi fondasi utama pada setiap inisiasi kerjasama yang hendak dilaksanakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam mewujudkan PMD.

**Kedua**, *Capacity building* merupakan model diplomasi pertahanan yang dilakukan dalam meningkatkan kapasitas demi kemampuan untuk menghadapi ancaman tradisional maupun non-tradisional. Agenda yang dilaksanakan dalam model diplomasi pertahanan ini meliputi pelatihan dan pendidikan militer bilateral.

Dalam bidang pelatihan dan pendidikan militer secara bilateral, Indonesia telah melakukan secara rutin dengan Amerika Serikat, Australia, dan RRT. Sementara itu, latihan bersama juga dilakukan dengan 6 negara lain dalam mekanisme pelaksanaan secara multilateral. Artinya, Indonesia tidak secara khusus dipertemukan dengan negara-negara tersebut dalam suatu pelatihan dan pendidikan militer antar dua negara. Absennya agenda pelatihan dan

pendidikan bersama juga dapat dikorelasikan dengan minimnya aspek transparansi dalam hubungan bilateral kedua negara seperti yang telah dibahas.

Dalam kegiatan pelatihan bersama tersebut, kedua negara secara tidak langsung membuka akses informasi kekuatan pertahanannya berkenaan dengan materi ajar yang disusun secara khusus agar peserta dari kedua negara menerima pembelajaran yang setara. Nyatanya, Indonesia dengan negara mitra masih perlu meningkatkan *transparency* agar pengembangan diplomasi pertahanan dalam *capacity building* dapat segera diwujudkan.

Selain latihan dan pendidikan, agenda yang lain, diantaranya: berupa penyediaan peralatan militer dan bantuan teknis lainnya, operasi militer bersama dan terkoordinasi, serta pertukaran keahlian dan saran pada kontrol angkatan bersenjata. Kesemuanya menunjukkan hasil yang sama yakni, belum meratanya antara Indonesia dengan 9 negara lain tersebut dalam upaya kegiatan-kegiatan demi meningkatkan kapasitas.

Ditinjau dari aktivitas diplomasi pertahanan dalam membangun kapasitas tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, pemerintah masih

memiliki pekerjaan rumah yang besar. Hal tersebut dibuktikan dengan masih didominasinya kegiatan pembangunan kapasitas tersebut dengan negara-negara seperti AS, Australia, dan RRT. Dari 9 negara tersebut, Indonesia perlu dilakukan peninjauan yang dilakukan dengan efisien mungkin dan dalam bidang-bidang yang menjadi keunggulan masing-masing negara. Hal tersebut tidak hanya dalam hal pendidikan dan pelatihan, namun bantuan teknis militer dan lainnya juga penting mengingat wilayah Indonesia yang sangat besar dan dibutuhkan percepatan perwujudan visi PMD dalam implementasinya.

**Ketiga**, berkaitan dengan *Defence Industry* dimana merupakan model diplomasi pertahanan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pembangunan dan penguatan industri pertahanan suatu negara. Dalam rangka mewujudkan PMD, kerjasama strategis yang disepakati Indonesia dengan negara mitra kerjasama meliputi tiga agenda utama, yaitu pengadaan alat utama sistem pertahanan negara (alutsista), penyeimbangan penguasaan teknologi persenjataan, dan penanaman investasi dalam pembangunan industri pertahanan.

Secara teknis, aktivitas pengadaan alutsista oleh Indonesia dari 5 negara

mitra, yakni AS, Korea Selatan, Denmark, Jerman, RRT, berlangsung secara baik dan dinilai cukup dapat memenuhi kebutuhan pertahanan yang mendesak saat ini. Adapula kesepakatan-kesepakatan lain yang menyertai pembelian alutsista, salah satunya melalui alih teknologi (*Transfer of Technology/ToT*). Alih teknologi sendiri menjadi salah satu upaya dalam mekanisme penguatan industri pertahanan, yang di kemudian hari diharapkan dapat meningkatkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Sementara itu, pada bidang penyeimbangan teknologi, sangat penting dilakukan, utamanya apabila negara yang bersangkutan telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan. Adanya alih teknologi menandakan kemajuan dalam hubungan bilateral karena sejatinya, membagikan kemampuan teknologi membutuhkan kepercayaan yang sangat besar dari satu negara ke negara lain. Kondisi ini dapat diamati dari kasus penolakan penjualan senjata oleh Belanda yang menitikberatkan pada ketidakpercayaan parlemen dan masyarakat atas pelaksanaan *good governance* di Indonesia. Lemahnya kepercayaan yang terbangun pada akhirnya menghambat pelaksanaan

rencana pembangunan postur pertahanan nasional. Namun pada perkembangannya, pemerintah dinilai mampu meningkatkan *confidence*, khususnya dalam upayanya merangkul negara mitra untuk turut berkontribusi dalam perwujudan Poros Maritim Dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesepakatan *transfer of technology* yang disebutkan di atas.

Terakhir, penanaman investasi negara mitra pada pengembangan infrastruktur kelautan Indonesia dinilai sudah cukup baik dilaksanakan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kesepakatan dengan 4 negara yakni, Australia, Denmark, Jepang, dan Jerman. Kedepannya, bantuan-bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat kekuatan maritim sehingga Indonesia mampu mendeklarasikan dirinya sebagai negara Poros Maritim di Dunia.

Berdasarkan analisa serta pembahasan tersebut, maka aktivitas diplomasi pertahanan Indonesia dalam rangka mewujudkan PMD masih banyak berkuat pada kegiatan CBM. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti kemampuan Indonesia dalam bidang pertahanan utamanya maritim maupun citra buruk pelanggaran HAM di masa lalu

yang masih belum cukup untuk meyakinkan negara-negara mitra. Sehingga di masa mendatang diharapkan adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan diplomasi pertahanan baik dengan 9 negara tersebut maupun negara-negara lain.

Di sisi lain, sarana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan PMD didukung pula oleh upaya pembangunan postur pertahanan. Pembangunan postur pertahanan sendiri tidak dapat dilepaskan dari 3 (tiga) komponen didalamnya, yakni kekuatan, kemampuan, serta gelar.

Jika dilihat dari pengembangan kekuatan, pemerintah Indonesia menggunakan komponen pertahanan berupa infrastruktur militer serta kebijakan deklaratif mengenai pelaksanaan aktivitas kemaritiman. Infrastruktur militer berupa penambahan kepemilikan Kapal Perang RI (KRI) dan pembangunan maupun perbaikan pelabuhan serta pangkalan khususnya daerah perbatasan seperti, Natuna, Morotai, Merauke, Sorong, Saumlaki, dan Sabang<sup>24</sup>. Sementara kebijakan deklaratif berupa Keputusan Presiden RI no. 12 tahun

---

<sup>24</sup> Yoedhi Swastanto, Wawancara pada 22 Mei 2018.

2018 dan Perpres Kebijakan Kelautan berikut dokumen dan rencana aksi-nya.

Kedua elemen tersebut sangat diperlukan dalam membangun kredibilitas Indonesia di lingkungan internasional. Pembentukan kredibilitas merupakan kebutuhan krusial bagi suatu negara dalam melakukan diplomasi.

Hal tersebut dikarenakan apabila suatu negara sudah mampu menciptakan kredibilitas yang baik, maka kepentingan negara tersebut mampu tersampaikan dan pada akhirnya meyakinkan negara lain untuk turut serta mendukung inisiasi tersebut<sup>25</sup>. Maka dari itu, dalam rangka membawa misi besar PMD ke ranah internasional, Indonesia perlu meningkatkan kesinambungan pembangunan kekuatan.

Lebih lanjut postur pertahanan yang dibangun juga tidak hanya ada dalam spektrum kekuatan namun juga kemampuan. Secara umum, kemampuan Indonesia masih jauh dari kondisi ideal, sehingga terdapat ketimpangan yang besar dan menghambat pelaksanaan diplomasi pertahanan yang dilakukan. Sejauh ini, dalam upaya meningkatkan kapabilitas, pemerintah dalam hal ini TNI-

AL meningkatkan kemampuan dalam kemampuan operasional dari Kotamabinops, *Maritime Surveillance System*, kemampuan pangkalan militer di perbatasan dan juga pembinaan potensi maritim<sup>26</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, kapasitas pertahanan sektor maritim Indonesia berfokus pada kekuatan pasukan dan armada di tataran operasional. Dengan adanya peningkatan kualitas prajurit dan sarana prasarana militer, hambatan berupa disparitas kemampuan dapat diminimalisir.

Adapun kemampuan yang dimiliki nantinya akan mempengaruhi mekanisme pelaksanaan aktivitas diplomasi pertahanan, misalnya pada kegiatan pelatihan bersama. Materi yang disampaikan dalam agenda joint-training harus bersifat sama rata. Artinya, prajurit negara yang terlibat diasumsikan telah memiliki keterampilan yang sepadan. Jika terdapat ketidaksetaraan kemampuan, maka tujuan pokok pelatihan bersama tidak akan tercapai karena salah satu negara anggota tidak mampu mengaplikasikan materi pembelajaran secara optimal.

---

<sup>25</sup> Paul Kreutzer, "Ten Principles of Operational Diplomacy: A Proposed Framework", (Academic Journal, 2014) hlm. 2.

<sup>26</sup> Ganda Wilaga, Wawancara pada 15 November 2017.

Selanjutnya, gelar pertahanan. Gelar sendiri merupakan dislokasi atau tata sebar dari kekuatan. Dalam pertahanan maritim, Indonesia dalam hal ini TNI-AL telah melakukan beberapa gelar diantaranya, berupa pengerahan KRI di perbatasan perairan Indonesia-Australia, penempatan pasukan di kepulauan Natuna serta wilayah armada lain seperti di Sorong<sup>27</sup>.

Indonesia menggelar kekuatan pertahanan berdasarkan dua agenda, yakni antisipasi dari ancaman nyata (pencegahan) serta resolusi konflik yang sudah terjadi (penanggulangan). Idealnya, gelar pertahanan difokuskan pada upaya penangkalan (*deterrence*), dalam hal ini penguatan daya tangkal di kawasan laut. Kehadiran entitas militer pada daerah rawan konflik pada akhirnya mampu meminimalisir kemungkinan konfrontasi karena salah satu negara terancam dengan kekuatan pertahanan negara lainnya.

Pada kesimpulannya, postur pertahanan yang kuat mampu meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional sehingga negara sasaran akan dengan mudah menyetujui kesepakatan kerjasama pertahanan dalam

mewujudkan visi Poros Maritim Dunia. Selain dengan mudah akan menyetujui, tidak menutup kemungkinan pula ranah kerjasama pertahanan juga akan meluas dan dilakukan dengan lebih mendalam seiring dengan bargain power Indonesia yang semakin kuat. Dalam posesnya, sarana tersebut harus dapat dibangun dengan selalu berpedoman pada prinsip-prinsip diplomasi seperti kredibilitas dan rasa saling percaya (*Confidence Building Measure*).

#### **Cara Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia**

Setelah mengungkapkan kepentingan nasional, mengidentifikasi ancaman dan peluang, menilai sumber daya nasional serta mengukur pengaruhnya terhadap pelaksanaan diplomasi pertahanan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cara (*ways*) untuk menguntai elemen-elemen tersebut. Pada titik ini, ahli strategi harus dapat merumuskan tujuan spesifik dan memutuskan dengan tepat bagaimana cara menggunakan instrumen untuk mencapai kepentingan tersebut<sup>28</sup>. Apabila merujuk pada pendapat Deibel diatas, maka pada tahap inilah inti dari sebuah

---

<sup>27</sup> Rasyid Al-Hafiz, Wawancara pada 13 November 2017.

<sup>28</sup> T. L. Deibel, *loc. cit.*

strategi, dikarenakan menyangkut kepada cara sebuah strategi dilaksanakan atau diimplementasikan.

Ditinjau dari pelaksanaan diplomasi pertahanan yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, Indonesia cenderung memprioritaskan pembentukan hubungan kerjasama pertahanan bilateral dengan negara *major power* seperti RRT, Amerika Serikat, Australia, Jepang<sup>29</sup>. Adapun program yang dirancang meliputi kerjasama dalam penguatan postur pertahanan, perekatan hubungan bilateral, penyusunan kerjasama industri pertahanan matra laut demi mendukung kemandirian, pembentukan budaya kemaritiman, serta pengembangan infrastruktur laut. Kelima agenda tersebut dinilai sudah selaras dengan visi PMD walaupun memang pada pelaksanaannya masih sangat terbatas. Salah satu faktor keterbatasan diplomasi pertahanan adalah perbedaan kepentingan strategis dalam penjagaan keamanan di wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks ini, Indonesia perlu untuk mengembangkan ranah diplomatiknya kepada negara-negara yang memiliki kedekatan, baik secara geografis maupun institusional, misalnya anggota ASEAN.

Di sisi lain, sementara ini belum ada kesepakatan yang dijalin secara khusus, dalam rangka mewujudkan PMD, kepada negara tetangga. Padahal, manfaat serta dampak diplomasi bilateral dengan negara tetangga lebih mudah diukur mengingat kedua aktor berada dalam lingkungan strategis yang sama. Namun hal ini dianggap wajar mengingat prinsip ASEAN yang pada dasarnya bukan merupakan sebuah pakta pertahanan, melainkan organisasi regional, di mana fokus dihadapkan pada berbagai isu. Namun yang menjadi masalahnya, isu pertahanan dan keamanan bukan merupakan fokus utama; merupakan satu dari sekian isu dari keseluruhan agenda kerjasama.

Dewasa ini, pada tingkat regional ASEAN, meskipun bukan merupakan sebuah pakta pertahanan, pada kenyataannya beberapa negara memiliki kedekatan khusus dengan negara-negara *major power* yang memiliki pengaruh dalam tiap keputusannya. Sebagai contoh, *Five Power Defense Arrangement* (FPDA) beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Selanjutnya, Kamboja secara perekonomian sangat terbantu oleh dukungan RRT sehingga mempengaruhi

---

<sup>29</sup> Sora Lokita, Wawancara pada 17 Oktober 2017.



keputusan-keputusan yang dikeluarkan olehnya. Pada akhirnya kesemuanya tidak lepas dari perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan RRT dimana saat ini memiliki pengaruh besar pada negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar.

Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara terbesar dan pemimpin alamiah di kawasan harus mampu memunculkan adanya netralitas dan urgensi pertahanan dan keamanan secara kolektif dalam kegiatan diplomatik di ranah ASEAN. Jika hal tersebut dibiarkan berlarut maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan terhambat dikarenakan tiap negara memiliki kepentingan sendiri yang juga tidak lepas dari pengaruh tiap negara major power di belakang negara-negara tersebut.

## Simpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dijabarkan, dianalisis serta dibahas pada bab sebelumnya, maka berikut ini adalah kesimpulan yang disusun ke dalam poin-poin berdasarkan rumusan masalah, yakni:

Hasil analisa data menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia memanfaatkan dua sarana yang digunakan dalam pelaksanaan diplomasi pertahanan. **Pertama**, adalah dengan

dilakukannya kerjasama pertahanan maritim dengan 9 negara mitra. **Kedua**, postur pertahanan yang berkaitan erat dengan pembentukan *bargaining power* di dalam pergaulan internasional.

Dalam penelitian ini, diperoleh hasil bahwasanya pembangunan sarana diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia secara umum masih belum maksimal. Hal tersebut tercermin dalam kerjasama pertahanan maritim dengan 9 negara yang masih memerlukan peningkatan secara signifikan terutama dari segi *Capacity Building* dan *Defence Industry*. Selain itu, unsur utama pembangunan postur pertahanan negara (kekuatan, kemampuan, gelar) juga masih belum dapat mendukung pembangunan postur pertahanan negara yang ideal dalam implementasinya.

Sementara itu, cara diplomasi pertahanan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia adalah dengan meningkatkan peran aktif Indonesia dalam berbagai forum dan organisasi mulai dari lingkup regional hingga internasional.

Pembangunan kerjasama yang dilakukan selama ini, masih terbatas dalam implementasinya untuk meningkatkan progress menuju Poros Maritim Dunia.

Pembangunan kerjasama pertahanan yang dilakukan selama ini, masih terbatas pada agenda implementasi *Confidence Building Measure* dalam rangka meningkatkan kemajuan menuju Poros Maritim Dunia. Sementara itu, dimensi *Capacity Building* serta *Defense Industry* sendiri belum dapat dicapai dengan baik. Penyebab utamanya yakni masih adanya perbedaan kepentingan strategis dalam penjagaan keamanan di wilayah. Selain, itu *bargain power* Indonesia juga masih kurang dapat dimaksimalkan diantaranya karena implementasi kerjasama pertahanan maritim dengan negara mitra yang masih memerlukan proses panjang dan postur pertahanan negara yang belum ideal.

### **Saran Praktis**

Saran praktis, terhadap pemerintah Indonesia, utamanya meliputi Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, diantaranya:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan meningkatkan secara progresif postur pertahanan negaranya. Hal tersebut tak lain dikarenakan situasi lingkungan strategis yang begitu dinamis sehingga diperlukan penguatan sektor pertahanan dan keamanan yang dapat menjaga keamanan kawasan dan

tentunya dapat mewujudkan visi Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia.

2. Mekanisme diplomasi pertahanan yang dilakukan selanjutnya juga dilakukan secara fokus dan kuat terhadap negara-negara regional ASEAN, utamanya secara bilateral pada tiap negara. Hal tersebut tidak lain untuk lebih dapat meningkatkan progress menuju terwujudnya Poros Maritim Dunia pada pilar pertahanan, keamanan, penegakkan hukum, dan keselamatan laut. Tidak lain dikarenakan apabila keamanan di regional telah dilaksanakan secara baik maka dukungan dari negara lain akan dapat diraih dengan mudah berikut pendalaman dan perluasan bidang kerjasama yang akan diperoleh nantinya.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Acharya, A. (1997). *The ASEAN Regional Forum: Confidence Building*. Canada: Dept. of Foreign Affairs and International Trade.
- Andrew Cottey, Anthony Forster. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Deibel, T. L. (2007). *Foreign Affairs Strategy: Logic for American*

*Statecraft*. London: Cambridge University Press.

Hart, B. H. L. (1967). *Strategy*. Praeger.

Joesoef, D. (2014). *Studi Strategi: Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. London: Sage Publications Inc.

Nye, J. (1990). *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.

Rais, J.D. (2004). *Menata Ruang Laut Terpadu*. PT. Pradnyaparamita.

### Jurnal

Gindarsah, I. (2015, Juni). Indonesia's Defence Diplomacy: Harnessing the Hedgy Strategy Against Regional Uncertainties. *RSIS Working Paper*, 1-19.

Kreutzer, P. (2014). Ten Principles of Operational Diplomacy: A Proposed Framework. *Academic Journal*, 2.

Pedrasan, R. (2015). ASEAN's Defence Diplomacy: The Road to Southeast Asian Defence Community? *Distertasi untuk Universitas Ruprecht-Karls*, 15.

### Dokumen

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia*. Jakarta.

### Wawancara

Hafiz, R. A. (2017, 13 November). Perwira Bantu Madya, Asisten Operasi TNI-AL.

Lokita, S. (2017, 17 Oktober). Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, Deputi Kedaulatan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI.

Suryanto, S. (2017, 25 Oktober). Kepala Sub-Direktorat Penyusunan Kebijakan dan Pengembangan Pertahanan Negara, Direktorat Kebijakan Strategi, Kementerian Pertahanan RI.

Swastanto, Y. (2018, 22 Mei). Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI.

Taufan, M. (2017, 26 Oktober). Diplomat Muda, Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kementerian Luar Negeri RI.

Wilaga, G. (2017, 15 November). Kepala Sub-Dinas Program Kelautan, Dinas Pembinaan Potensi Maritim Markas Besar TNI-AL.

### Laman Web

X, Hamengku Buwono. (2014, September). *Budaya Maritim Indonesia: Peluang, Tantangan, dan Strategi*. Diakses dari [maritim.wg.ugm.ac.id](http://maritim.wg.ugm.ac.id): [http://maritim.wg.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2014/09/NgarsoDalem\\_MaritimRoadMapUGM.pdf](http://maritim.wg.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2014/09/NgarsoDalem_MaritimRoadMapUGM.pdf), diakses pada 30 Juli 2017.

